

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DIGITALISASI KEUANGAN DI KANTOR DESA
BERGOLO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA****Mochammad Al Adib^{1(a)}, Anis Susanti^{1(b)}**^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang^{a)}adibsadewo87@students.unnes.ac.id, ^{b)}anissusanti@mail.unnes.ac.id**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

18-06-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:Digitalisasi, Good Governance,
Siskeudes, Manajemen Keuangan
Kantor Desa**Keywords:**Digitalization, Good Governance,
Siskeudes, Village Office Financial
Management**Corresponding Author:**adibsadewo87@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Digitalisasi pengelolaan keuangan desa menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah melalui Kemendagri dan BPKP mendorong penggunaan aplikasi terintegrasi agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan berlangsung lebih tertib, meskipun implementasinya di desa masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM. Penelitian ini menganalisis penerapan digitalisasi keuangan desa melalui Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS di Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Inisiatif ini sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan kebijakan BPKP yang menekankan transparansi. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena hambatan seperti kompetensi aparat yang terbatas, akses internet yang tidak merata, serta integrasi sistem yang belum berjalan baik. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi digital belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola yang baik dan berdampak pada efektivitas pelaporan serta pengelolaan keuangan desa. Hasil studi ini memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan digitalisasi.

ABSTRACT

Digitalizing village financial management has become a national priority to enhance transparency and accountability. The government, through the Ministry of Home Affairs and BPKP, promotes the use of integrated applications to ensure more orderly processes of planning, budgeting, and financial reporting, although implementation at the village level still faces technical and human resource limitations. This study analyzes the implementation of digital financial management through Siskeudes, Siskeudes Link, and CMS in Bergolo Village, Ngawen District, Blora Regency. These initiatives align with Ministry of Home Affairs Regulation No. 20/2018 and BPKP's technical policies emphasizing transparency. However, their utilization remains suboptimal due to challenges such as limited staff competencies, uneven internet access, and incomplete system integration. Using a qualitative case study approach with interviews, observations, and documentation, the study finds that the digital applications have not fully met good governance principles and have affected the effectiveness of financial reporting and management. The findings offer insights for improving digitalization efforts at the village level.

DOI:<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1300>

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan serta mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, maupun nilai-nilai tradisional yang diakui dalam sistem ketatanegaraan (Lingawe et al., 2014). Dalam konteks pemerintahan nasional, desa memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan publik yang berbasis lokal. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh perangkatnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas ini adalah kemampuan dalam mengelola keuangan desa secara mandiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah (Herpendi & Nasir, 2018), termasuk di dalamnya pengelolaan arsip dan administrasi keuangan (Sudaryat et al., 2025). Untuk menunjang akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola tersebut, pemerintah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Ningsih et al., 2022), yang dirancang oleh BPKP dan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Siskeudes membantu desa dalam menyusun anggaran, mencatat transaksi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban (Sulina et al., 2017). Namun, penerapan sistem ini di berbagai daerah belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2023, Indonesia masih berada pada tahap awal transformasi digital, khususnya di daerah pedesaan, dengan skor infrastruktur digital yang masih tergolong rendah (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi digital seperti Siskeudes dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa secara signifikan. Penelitian oleh Nurrahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengumpulan dokumen pendukung seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal serupa diungkapkan oleh Mercya (2020) yang menemukan bahwa pelaksanaan Siskeudes telah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan sesuai peraturan, sedangkan Normarisa dan Taupik (2024) menyimpulkan bahwa aplikasi

ini telah memperkuat praktik good governance di tingkat desa.

Kondisi di Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora mencerminkan tantangan tersebut. Walaupun desa ini termasuk aktif dan disiplin dalam pengelolaan keuangan, seperti ditunjukkan melalui pelunasan PBB tepat waktu, namun penerapan aplikasi digitalisasi belum berjalan tanpa hambatan. Kendala utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis SDM desa, lemahnya jaringan internet, serta belum optimalnya integrasi antara Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS yang kadang justru menambah beban kerja. Hambatan-hambatan teknis dan sosial ini juga ditemukan pada studi serupa, seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana implementasi digitalisasi kependudukan terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, distribusi informasi yang belum merata, serta prosedur yang masih membutuhkan kehadiran fisik (Ahmadi et al., 2025). CMS adalah layanan transaksi keuangan berbasis internet banking yang ditujukan bagi entitas non-perorangan seperti pemerintah desa. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan transaksi non-tunai antar lembaga, serta memungkinkan transaksi dan pemantauan dana dilakukan secara real-time (Faizah & Sari, 2022).

Realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan sistem digital dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengukur sejauh mana aplikasi digital tersebut benar-benar mendukung pengelolaan keuangan desa secara efektif, dan strategi konkret apa yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem digitalisasi keuangan desa menggunakan Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS di Desa Bergolo serta mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis simultan terhadap tiga platform Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS serta evaluasi integrasinya dalam satu ekosistem digital di level desa. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hambatan teknis dan tata kelola yang selama ini belum terlihat dalam studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dasar evaluasi bagi pemerintah desa, serta masukan kebijakan bagi pemangku

kepentingan terkait dalam upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang menurut Sugiyono (2019) bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam pengalaman individu atau kelompok yang berkaitan dengan fenomena sosial tertentu. Metode kualitatif yang digunakan berfokus pada satu objek utama diteliti secara mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan dinamika yang terjadi. Objek penelitian ini adalah penerapan sistem digitalisasi keuangan desa yang berlokasi di Balai Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dan penelitian dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama (3 orang), yakni pengelolaan keuangan desa, terkait pelaksanaan aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur, regulasi, dan teori yang mendukung analisis tentang digitalisasi sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Wawancara melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Kepala Desa, Bendahara sekaligus operator aplikasi, dan Sekretaris Desa. Tujuannya adalah memperoleh informasi menyeluruh tentang prosedur penggunaan aplikasi, hambatan yang dihadapi selama proses implementasi, dan kesesuaian hasil pelaporan dengan peraturan yang berlaku. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses input dan pengelolaan data dalam sistem digital tersebut, guna mengidentifikasi persoalan teknis di lapangan. Dokumentasi yang dianalisis meliputi dokumen perencanaan seperti RAPBDes, laporan realisasi anggaran, bukti-bukti transaksi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

Validitas temuan dijamin melalui teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan data dari berbagai metode dan sumber agar tercapai konsistensi dan ketepatan informasi. Proses triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan dari narasumber yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga

tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring dan memilih informasi penting yang berkaitan dengan implementasi sistem digital keuangan desa. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan visual seperti tabel atau grafik untuk memperjelas temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul dari hasil analisis, yang menjadi dasar bagi pemberian rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem digitalisasi keuangan desa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses manajerial yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di desa (Wongku & Hapsari, 2019). Dalam konteks ini, seluruh aparat desa, tanpa terkecuali, terlibat dalam suatu siklus yang terintegrasi dan saling berkaitan.

Pada tahap perencanaan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan dokumen RKPDesa, dan kemudian diajukan kepada Kepala Desa serta dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses ini wajib diselesaikan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Tahap pelaksanaan mensyaratkan seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti pengeluaran resmi. Penatausahaan menjadi kewenangan Bendahara Desa yang wajib mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran secara tertib serta menyusun laporan keuangan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Dalam hal pelaporan, Kepala Desa berkewajiban menyerahkan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota sebanyak dua kali dalam setahun. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyusun laporan tahunan yang memuat informasi terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, aset desa, dan program pemerintah pusat atau daerah yang telah diterima oleh desa.

Seluruh proses ini harus berada dalam pengawasan serta pembinaan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi guna menjamin kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bentuk inovasi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah melalui BPKP dan Kemendagri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah aparat desa dalam menjalankan seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akhir (BPKP, 2018). Perbedaan signifikan antara sistem manual dan Siskeudes terletak pada integrasi dan efisiensi pelaporan. Bila sistem manual menghasilkan laporan yang terpisah dan cenderung tidak efisien, maka dengan Siskeudes laporan dapat disusun secara lengkap dan sistematis, sehingga mempercepat proses administrasi (Sulina et al., 2017).

Sebagai pengembangan lebih lanjut, hadirnya Siskeudes Link memungkinkan koneksi langsung antar desa dan server kabupaten secara daring (online), sehingga pelaporan dan pengawasan dapat dilakukan secara real-time oleh pemerintah daerah (BPKP, 2018). Dengan sistem ini, pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu dokumen laporan secara manual dari desa, karena progres pelaksanaan anggaran dan penggunaan dana dapat dipantau secara langsung. Hal ini bukan hanya mempercepat pelaporan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan serta meningkatkan keakuratan data keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Siskeudes Link juga mendukung proses sinkronisasi antar instansi dan mendorong keterpaduan sistem pengawasan yang lebih kuat.

Selain Siskeudes dan Siskeudes Link, Desa Bergolo juga menggunakan Cash Management System (CMS) dari BRI. Desa Bergolo yang terletak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh desa yang telah menerapkan digitalisasi keuangan secara komprehensif. Pemerintah desa terdiri atas perangkat yang lengkap sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat pelaksana lainnya. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab, desa ini telah menggunakan

sistem digital melalui Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS. Ketiga sistem tersebut diimplementasikan secara terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban secara elektronik.

Melalui penerapan sistem ini, Desa Bergolo berupaya menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan efisien dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sistem digital ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi kelembagaan di tingkat lokal dan regional.

Tahapan Penggunaan Sistem Digitalisasi Keuangan Desa Aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link dan CMS

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan desa yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Desa Bergolo telah mengimplementasikan sistem digital pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan Cash Management System (CMS). Implementasi sistem digital ini bertujuan untuk mendukung efektivitas dalam pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, observasi langsung di lokasi, serta analisis terhadap dokumen-dokumen pengelolaan keuangan yang tersedia, dapat dirinci tahapan operasional dari penggunaan ketiga sistem digital tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, proses awal pengelolaan keuangan dilakukan melalui penyusunan RKPDes yang menjadi dasar penyusunan APBDes. Ia menjelaskan:

“ . . . Setiap tahun kami mulai dari penyusunan RKPDes dulu. Setelah itu baru kita turunkan ke APBDes dan semua datanya diinput lewat Siskeudes. Kami pastikan program dan anggaran yang masuk sesuai kebutuhan desa.”

Sementara itu, Kaur Keuangan menyampaikan bahwa proses teknis

penginputan dilakukan oleh operator desa dengan pendampingan PLD:

“ . . . Secara teknis yang menginput itu operator, tapi kami tetap koordinasi dengan PLD supaya data yang masuk benar. Kadang ada revisi, jadi harus dicek ulang sebelum final.”

Hasil observasi juga mengonfirmasi bahwa penginputan dilakukan langsung di kantor desa. Dokumen pendukung menunjukkan bahwa rancangan APBDes terlebih dahulu disusun dalam format digital melalui Siskeudes, lalu dicetak untuk proses validasi dan pengesahan oleh BPD. Kaur Keuangan menegaskan:

“ . . . Setelah selesai di sistem, tetap harus dicetak untuk diverifikasi BPD. Baru setelah itu disahkan.”



Gambar 1. Tahap Perencanaan Aplikasi Siskeudes

Sumber: Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang kemudian menjadi acuan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui input data pada aplikasi Siskeudes. Proses ini secara teknis dilakukan oleh operator desa yang bekerja sama dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Hasil observasi menunjukkan bahwa penginputan dilakukan langsung di kantor desa, sementara dokumen pendukung yang diperoleh menunjukkan bahwa rancangan APBDes telah tersusun dalam bentuk digital, lalu dicetak sebagai dokumen fisik guna proses validasi dan pengesahan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan anggaran di Desa Bergolo dilakukan secara non-tunai dengan

memanfaatkan Cash Management System (CMS). Dari hasil wawancara bersama Bendahara Desa, terungkap bahwa penggunaan CMS memberikan kemudahan dalam proses pencairan dana karena sistem ini telah terintegrasi langsung dengan rekening kas milik desa. Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa setiap transaksi kegiatan disertai dokumen pendukung seperti kuitansi dan nota pembelian sebagai bukti penggunaan anggaran. CMS secara otomatis mencatat aktivitas transaksi dan mengirimkan notifikasi real-time, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pencocokan data pada sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.



Gambar 2. Aplikasi Cash Management System (CMS)

Sumber: Peneliti, 2025

3. Penatausahaan

Aktivitas penatausahaan keuangan desa dilakukan setiap hari oleh Bendahara Desa melalui aplikasi Siskeudes dengan mencatat seluruh arus kas berdasarkan dokumen pendukung. Dalam wawancara, Bendahara Desa menjelaskan:

“ . . . Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, langsung saya input ke Siskeudes. Kalau ada bukti fisik, semua harus dicocokkan dulu sebelum dicatat.”

Untuk memastikan keterpaduan data dengan pemerintah kabupaten, desa memanfaatkan Siskeudes Link sebagai penghubung sistem keuangan desa dan kabupaten secara daring. Bendahara menambahkan:

“ . . . Siskeudes Link itu penting supaya data kami langsung terkirim ke kabupaten. Jadi mereka bisa pantau tanpa harus minta laporan manual lagi.”

Telaah dokumentasi laporan bulanan menunjukkan bahwa pencatatan menjadi lebih

efisien dan terstandarisasi karena sistem menyediakan format baku. Observasi terhadap buku kas umum digital juga memperlihatkan pencatatan yang rapi dan lengkap, sebagaimana ditegaskan Bendahara:

“... Di sistem sudah ada formatnya, jadi tinggal ikuti saja. Semua pemasukan dan pengeluaran otomatis tersusun rapi, termasuk tanggal dan kegiatannya.”

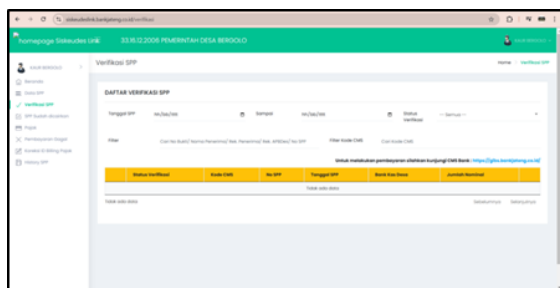
4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, perangkat desa menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu karena laporan realisasi APBDes dapat dihasilkan secara otomatis dari data transaksi yang sudah diinput. Sekretaris Desa menyampaikan:

“... Kalau pelaporan, sistem sudah otomatis merekap dari transaksi yang masuk. Kami tinggal cek dulu sebelum dikirim.”

Laporan yang telah dihasilkan kemudian disampaikan kepada pihak kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Pemanfaatan Siskeudes Link dinilai mempercepat proses tersebut. Kaur Keuangan menambahkan:

“... Dengan Siskeudes Link, kami bisa unggah laporan langsung. Tidak perlu menunggu manual, jadi lebih cepat sampai ke kabupaten.”



Gambar 3. Aplikasi Siskeudes Link
Sumber: Peneliti, 2025

Hasil observasi menunjukkan adanya fitur unggah data melalui koneksi internet yang mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan server kabupaten. Peninjauan terhadap dokumen semesteran dan tahunan memperlihatkan bahwa data realisasi APBDes yang tercantum berasal langsung dari sistem, mencerminkan bahwa teknologi telah membantu mempercepat dan memudahkan proses pelaporan keuangan desa.

5. Pertanggungjawaban

Hasil penelusuran dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes disusun berdasarkan data yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes dan CMS. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa penyusunan laporan akhir tahun kini lebih terstruktur:

“... Untuk LPJ, kami tinggal menarik data dari Siskeudes. Semua komponen pendapatan, belanja, sampai pembiayaan sudah otomatis tersusun sesuai format standar.”

Kaur Keuangan juga menegaskan bahwa integrasi data mempermudah proses penyusunan LPJ:

“... Dulu kami harus rekap manual, sekarang tinggal cek, validasi, lalu cetak. Sistemnya sudah menyambungkan dari perencanaan sampai realisasi.”

Observasi selama penyusunan laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa informasi keuangan dari seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah terintegrasi dalam sistem. Integrasi ini secara signifikan mempercepat proses penyusunan LPJ, sekaligus memastikan laporan tersusun secara menyeluruh, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 4. Tahap Pertanggungjawaban Aplikasi Siskeudes
Sumber: Peneliti, 2025

6. Kesesuaian Laporan Keuangan Desa yang Dihasilkan oleh Aplikasi

Secara normatif, laporan keuangan desa yang dihasilkan melalui aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS seharusnya telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan, idealnya dokumen anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDesa) dan dituangkan dalam APBDesa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, hasil wawancara dengan pihak terkait di Desa Bergolo menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap penyusunan RKPDesa secara komprehensif.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, seluruh transaksi seharusnya dicatat secara digital melalui CMS dan otomatis tersinkronisasi dengan sistem Siskeudes. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pencatatan masih kerap dilakukan secara manual terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sistem digital, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidaksesuaian data. Dalam tahap penatausahaan, meskipun bendahara desa telah bertanggung jawab mencatat setiap transaksi dengan bukti pendukung, hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa proses unggah dokumen transaksi ke dalam sistem belum dilakukan secara rutin, sehingga data yang terekam tidak selalu mencerminkan kondisi aktual secara real time.

Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan keuangan desa seharusnya disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan waktu. Namun demikian, hasil wawancara mengindikasikan bahwa proses pelaporan kerap mengalami keterlambatan akibat kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, serta permasalahan administratif, termasuk kesalahan dalam pengoperasian aplikasi. Oleh sebab itu, meskipun sistem digital telah diimplementasikan, pelaksanaannya di Desa Bergolo masih belum optimal dan memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis yang lebih berkelanjutan.

Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link dan CMS

Hasil wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Bergolo dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek teknis pengoperasian aplikasi. Beberapa perangkat

desa masih mengalami kesulitan dalam memahami fungsi dan alur kerja aplikasi, yang menyebabkan terjadinya kesalahan entri data serta keterlambatan dalam proses pengisian.

Selain itu, kendala teknis seperti kualitas jaringan internet yang tidak stabil menjadi masalah yang cukup krusial. Koneksi yang lambat menghambat proses sinkronisasi data antar sistem, khususnya antara CMS dan Siskeudes Link, yang berdampak langsung pada ketepatan waktu pelaporan bulanan maupun semesteran. Infrastruktur perangkat keras yang kurang memadai, seperti komputer dengan spesifikasi rendah, turut memperlambat pekerjaan harian aparatur desa.

Kendala lainnya adalah masih tingginya ketergantungan terhadap pendamping teknis dari kecamatan, baik dalam hal operasionalisasi sistem maupun verifikasi data. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian desa dalam pengelolaan keuangan berbasis digital masih terbatas, sehingga proses terganggu ketika tenaga pendamping tidak tersedia. Ditambah lagi, beberapa dokumen transaksi keuangan yang diwajibkan untuk diunggah ke sistem belum selalu lengkap atau tidak sesuai format, yang berdampak pada keterlambatan proses verifikasi dan penyusunan laporan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi keuangan desa di Bergolo masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan pembenahan aspek administrasi agar sistem benar-benar dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Manfaat Penerapan Sistem Digitalisasi Keuangan Desa di Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS dirasakan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Bergolo. Sistem ini membantu menyederhanakan proses administrasi keuangan dan memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis, asalkan seluruh tahapan sebelumnya dilakukan secara tepat dan konsisten. Jika data yang dimasukkan sejak tahap perencanaan telah sesuai dan lengkap, maka laporan akhir yang dihasilkan pun akan akurat dan sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, kesalahan pada salah satu tahapan dapat berdampak pada keseluruhan proses,

karena sistem bersifat terintegrasi dan saling bergantung. Oleh sebab itu, pengoperasian aplikasi ini memerlukan ketelitian, ketekunan, dan pemahaman yang baik dari para pengelola, agar manfaat digitalisasi dapat benar-benar dirasakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, khususnya di wilayah Desa Bergolo.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Bergolo melalui aplikasi Siskeudes, Siskeudes Link, dan CMS telah mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, pemanfaatan aplikasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan kapasitas SDM, ketergantungan pada pendamping teknis, serta infrastruktur internet yang belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah operasional yang lebih konkret untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan digital desa. Pertama, penguatan kapasitas perangkat desa dapat dilakukan melalui pelatihan rutin berbasis modul, termasuk (1) pelatihan input data Siskeudes dan Siskeudes Link setiap triwulan, (2) *coaching clinic* mingguan bersama PLD untuk mengevaluasi kesalahan pencatatan, serta (3) sertifikasi internal bagi operator keuangan desa agar kompetensinya terstandar. Kedua, perbaikan infrastruktur digital perlu difokuskan pada penyediaan perangkat pendukung, seperti laptop khusus keuangan dengan spesifikasi minimal, koneksi internet yang stabil menggunakan paket dedicated atau antena penguat sinyal, serta sistem *backup* data otomatis ke penyimpanan awan. Ketiga, penyusunan SOP internal perlu dibuat lebih teknis, meliputi alur input transaksi harian, batas waktu unggah laporan mingguan di Siskeudes Link, mekanisme verifikasi berjenjang sebelum laporan dikirim ke kecamatan, serta standar pengarsipan digital dokumen pendukung. Ke depan, desa dapat mengembangkan dashboard monitoring internal yang menampilkan progres realisasi

anggaran, notifikasi keterlambatan input, dan rekam jejak revisi transaksi sebagai alat kontrol mutu. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji model integrasi Siskeudes–CMS–Siskeudes Link dalam satu platform lokal untuk memangkas duplikasi kerja dan meningkatkan akurasi data keuangan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R., Erfina, E., Asad, M. A., Sapri, S., & Dema, H. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang: Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 86–94.
- BPKP (2018). Berita Negara. Tentang standar biaya masukan lainnya yang berlaku pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan dengan, 151(2), 10–17.
- Dwi Nurrahmawati, Yuarne Gabrila Sriyanto, & Nuwun Priyono. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*.
<https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.856>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Herpendi, H., & Nasir, A. (2018). Aplikasi Arsip Keuangan Masuk dan Keluar Berbasis Web (Studi Kasus PT. Cakra Perkasa Jaya Mulia Banjarmasin). *Jurnal Sains Dan Informatika*.
<https://doi.org/10.34128/jsi.v4i1.126>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia. *Imdi.Sdmdigital.Id*.
https://imdi.sdmdigital.id/home_2023

- Lingawe, O., Rumapea, P., & Dengo, S. (2014). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*.
- Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Normarisa, & Taupik, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7(1), 633–648.
- Rusdiyanto, W., Respati, Y. A., & Yoviantyas, C. (2022). Pelatihan Pengelolaan Arsip Bagi Perangkat Desa Sinduharjo Ngaglik Sleman. *International Journal of Community Service Learning*. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.49897>
- Sudaryat, Y., Djadjuli, R. D., Juliarso, A., Hidayat, E. S., Marliani, L., & Galuh, U. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Studi Kasus di Desa Bendasari ., 11, 99–107.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba- Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*.
- Wongku, E. M., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Kesesuaian Penerapan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah AkMen*, 16(3), 355–367.